

PSBB JAKARTA BERDAMPAK LUAS

Ekonomi Tertekan, Bansos Tak Tambah

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diterapkan di DKI Jakarta, maka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan antara 0 persen hingga minus 2,1 persen.

"Dalam skenario berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III bakal lebih tertekan dan tidak sesuai proyeksi pemerintah yang berkisar 0 sampai minus 2,1 persen. Kalau kita melihat PSBB ini cukup drastis kayak sebelumnya, maka *lower end* bisa saja lebih rendah," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/9).

Sementara pada kuartal IV diperkirakan per-

tumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,4-3,1 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 di perkirakan akan mencapai minus 1,1-0,2 persen.

Lebih lanjut dikatakan Sri Mulyani, PSBB akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, ekonomi DKI Jakarta berkontribusi sebesar 17,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Proyeksi ini tergantung kita semua, apakah jumlah Covid-19 ini meningkat atau tidak di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi bersama dengan 8 provinsi yang dipantau oleh pemerintah," tegasnya.

Sementara itu di Yogyakarta, sejumlah usaha catering terkena dampak dari kebijakan PSBB DKI Jakarta dan penolakan kunjungan tamu luar daerah. Namun demikian untuk event wedding (pernikahan) tetap berjalan sesuai undangan yang sudah beredar.

"Ada event minggu ini ditunda dan berubah.

Sebelumnya awal pandemi di bulan Maret banyak event batal atau mundur kemudian sempat membaik dengan adanya pesanan September-Oktober kini sebagian dibatalkan lagi," ucap Ketua DPD PPI (Perkumpulan Pengusaha Jasa Boga Indonesia) DIY, Hj Sri Wahyuni Dewi SE MM ketika dikonfirmasi KR, Selasa (15/9).

Pemilik Katering Sari Dewi ini mengaku selama masa pandemi Covid-19 ini usahanya kehilangan omzet hingga Rp 1,5 miliar. "Untuk kerugian anggota PPI lainnya bervariasi, kami tidak bisa menghitung," ujarnya.

(Lmg/R-4)-d



KR-Istimewa

Daihatsu Perkuat Kepedulian kepada Customer

JAKARTA (KR) - Daihatsu menerapkan standar baru penyerahan mobil kepada konsumen dengan menyempatkan disinfektan dan memberikan satu botol disinfektan kepada pembeli mobil baru. Langkah ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 kepada semua pembeli mobil baru Daihatsu di seluruh Indonesia, sekaligus bentuk komitmen Daihatsu kepada customer.

Chief Executive Officer (CEO) PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Supranoto di Jakarta, Selasa (15/9) menyebutkan, standar baru di bagian penjualan ini berlaku di semua outlet Astra Daihatsu dan dealer di seluruh Indonesia. Dengan cara ini diharapkan kenyamanan konsumen dapat tetap terjaga dan tak perlu was-was.

la menjelaskan, penyempitan disinfektan di bagian-bagian mobil yang sering disentuh akan dilakukan petugas di depan konsumen sebelum mobil diserahkan kepada pemiliknya. Konsumen juga mendapatkan satu botol disinfektan. Marketing and CR Di-

visi Head AI-DSO Hendrayadi Lastiyoso mengatakan, selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus 2020, penjualan Daihatsu baik retail maupun whole sales cukup baik setelah sebelumnya saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melemah.

Dikatakan, penjualan retail Daihatsu pada Juli tercatat 5.890 unit dan Agustus 6.300 unit. Sedangkan penjualan year to date (YtD) Agustus 2020 tercatat 65.767 unit. Secara persentase penjualan retail Juli-Agustus 2020 meningkat 7% lebih tinggi dari kenaikan pasar secara keseluruhan yang hanya 5,2%. Sedangkan penjualan YtD Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019, untuk retail turun 42,6%, namun masih lebih baik daripada penurunan pasar secara total 46,2%.

Hendrayadi menjelaskan, berdasarkan data Gabungan Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan whole sale Daihatsu pada Juli 2020 tercatat 1.553 unit dan Agustus 2020 meningkat drastis menjadi 6.651 unit. Sedangkan, penjualan whole sale YTD Agustus 2020 tercatat 57.978 unit.

(San)-f

PERJALANAN JADI MOMOK PENULARAN KORONA

Perantau Diimbau Jangan Mudik

GUNUNGKIDUL (KR) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali mengimbau para perantau luar daerah untuk tidak mudik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan riwayat perjalanan dari luar daerah masih terus terjadi. Penambahan kasus positif berasal dari pelaku perjalanan dari luar daerah mendominasi karena itu Pemkab terus melakukan antisipasi.

"Termasuk dengan menggalakan operasi penggunaan masker demi mengurangi risiko penularan Covid-19," kata Wakil Bupati Gunungkidul Dr Immanuel Wahyudi MH, Selasa (15/9).

Saat ini warga perantau yang kini berada di zona merah dan mudik ke Gunungkidul ternyata sangat berisiko untuk menularkan virus Korona ke keluarga yang ada di Gunungkidul. Namun begitu Immanuel juga meminta kepada masyarakat untuk ti-

dak melakukan penolakan berlebihan kepada para pendatang.

Jangan atas kepentingan yang kecil mengorbankan kepentingan bersama. Kepada pemudik yang telanjur datang diminta agar langsung melaporkan ke kalurahan setempat, dan didata unyuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Desa (SID).

Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo, terjadi penambahan positif Covid-19 11 orang. Sehingga total jumlah terinfeksi Covid-19 sebanyak 117 orang, yang terdiri 14 masih dirawat di rumah sakit, 37 isolasi mandiri, 63 sembuh, dan 3 meninggal.

"Memang terjadi lonjakan jumlah yang positif," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo drg Banih Rahayujati MKes, Selasa (15/9).

Sementara itu, kasus positif Covid-19 di DIY terus mengalami lonjakan cukup signifikan sebesar 26 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi di DIY menjadi 1.895 kasus saat ini.

Sebagian besar tambahan kasus terkonfirmasi ini mempunyai riwayat awal dari hasil tracing kontak kasus positif Covid-19.

Sementara itu, kasus sembuh bertambah sebanyak 15 kasus maka total kasus sembuh di DIY menjadi 1.370 kasus. Data tersebut dari hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji mengungkapkan bertambahnya kasus positif yang tergolong cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir, butuh penanganan serius. Karena kalau kondisi tersebut terus terjadi dikhawatirkan beban tenaga medis sebagai garda terdepan akan menjadi semakin berat. Supaya hal itu tidak terjadi kuncinya ada pada kedisiplinan masyarakat dalam penagakan protokol kesehatan. Karena cara tersebut dinilai cukup efektif dalam mencegah terjadinya penularan.

(Bmp/Wid/Ira/Ria)-d

Sambungan hal 1

Toto Santoso, Muhammad Sofyan juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

"Kami akan berkoordinasi apakah banding atau tidak," ucapnya

Kemunculan Keraton Agung Sejagat ini, Minggu (12/1/2020) menjadi pembicaraan masyarakat. Lebih-lebih ketika video acara wujungan dan kirab budaya yang mereka adakan, Jumat 10 Januari 2020 kemudian viral di medsos. Keraton Agung Sejagat yang dipimpin Sinuwun yang bernama asli Toto Santosa Hadiningrat dan istrinya yang dipanggil Kanjeng Ratu yang memiliki nama Dyah Gitarja, kemudian ramai didatangi warga masyarakat.

Polisi bertindak cepat dengan menangkap Toto Santoso dan istrinya. Aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga merupakan formulir rekrutmen anggota Keraton Agung Sejagat. Toto dan istrinya ditangkap karena diduga menyebarkan berita bohong.

Penasihat Keraton Agung Sejagat,

Resi Joyodiningrat saat itu menegaskan, Keraton Agung Sejagat bukan aliran sesat seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Keraton Agung Sejagat merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, dihitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai 2018.

Perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan oleh Dyah Ranawijaya sebagai penguasa imperium Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang Barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka pada 1518.

Joyodiningrat menyatakan, dengan berakhirnya perjanjian tersebut, berakhir pula dominasi kekuasaan Barat mengontrol dunia yang didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Menurut dia, kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra.

(Jas)-d

Sambungan hal 1

Bahkan penurunan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi pada kondisi terjadinya stagnasi ekonomi.

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah tahun 2020 akan dilanjutkan pada 2021. Sehingga menyebabkan akan terjadinya defisit anggaran pada RAPBN 2021 sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Pemerintah tetap akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 dengan fokus dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Tetapi pelaksanaan PEN tahun mendatang diharapkan lebih mengena sasaran. Dan BPK yang akan melakukan audit besar-besaran terhadap PEN tahun 2020.

Kebijakan moneter yang dilakukan dalam kondisi ekonomi mengalami deflasi termasuk kebijakan moneter yang ekspansif. Kebijakan ini bertumpu kepada penambahan jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter yang dilakukan di antaranya pertama penurunan suku bunga acuan BI (7 day reverse repo rate, BI7DRR) yang telah memasuki beberapa perubahan hingga bertahan pada tingkat 4%. Penurunan suku bunga acuan pada BI menyebabkan Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan juga turut menurunkan suku bunga pinjaman (kredit).

Kebijakan kedua, yaitu dengan operasi pasar terbuka. Di mana BI membeli Surat Berharga Negara (SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara) di pasar sekunder. Kebijakan tambahan lainnya, BI juga menyediakan likuiditas di pasar perbankan melalui mekanisme repo (*term-repurchase agreement*), swap valuta asing, hingga menurunkan giro wajib minimum (GWM). Sehingga kondisi likuiditas perbankan saat ini dianggap cukup memadai.

Paduan kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan harapannya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah deflasi yang terjadi. Kalau kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan dengan pola manajemen yang *extra ordinary*, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan mengalami fase ekspansi. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan tercapai pada tingkat antara 4,5% hingga 5,5% dan tingkat inflasi antara 2-4% sesuai dengan patokan RAPBN 2021. Kiranya tidaklah mustahil untuk dapat tercapai.

(Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang)-d

Dihukum

Jaksa menuntut keduanya dengan hukuman penjara selama enam tahun.

Majelis hakim yang terdiri Sutarno, didampingi Anshori Hironi dan Samsumar Hidayat, juga memerintahkan keduanya tetap menjalani masa hukuman.

Dalam persidangan yang dilangsungkan secara daring itu, majelis hakim tetap berada di ruang sidang PN Purworejo, jaksa dan pengacara di Kantor Kejari Purworejo, sedangkan para terdakwa di Rutan II B Purworejo. Pada awal sidang, kedua terdakwa tampak tegar mendengarkan pembacaan amar putusan.

Saat putusan hukuman dibacakan, Fani terlihat menguatkan dengan menggenggam erat tangan suaminya. Fani kemudian menangis setelah mendengar putusan itu.

Jaksa Masruri Abdul Aziz mengatakan pikir-pikir menyikapi vonis terhadap keduanya. "Kemungkinan besar akan banding untuk vonis Fani yang belum 2/3 dari tuntutan kami," ujarnya.

Sementara itu, penasihat hukum

Jerat

Kondisi terjadinya penurunan harga-harga barang dapat dilihat sebagai kondisi yang menyenangkan bagi seseorang yang mempunyai pendapatan lebih, karena dapat memperoleh aneka barang yang lebih banyak. Kenyataannya, yang mempunyai pendapatan yang lebih memang ada dalam masyarakat, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Tentu bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan pas-pasan atau kekurangan.

Perilaku orang dengan pendapatan lebih dalam masa sekarang tentunya tidak akan begitu saja mengumbar pengeluaran untuk membeli barang yang harganya secara umum menurun. Mereka akan tetapi lebih berhati-hati melihat terjadinya penurunan kegiatan ekonomi. Motif berjaga-jaga dilakukan kelompok tersebut, dengan melakukan investasi yang dianggapnya aman.

Sebaliknya gejala deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut lebih mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan daya beli yang menurun akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok (primer) terlebih dahulu, khususnya pada pangan. Dan melihat menurunnya daya beli pada masyarakat, maka bagi pengusaha yang penting usahanya dapat berjalan dengan marjin keuntungan yang kecil.

PENERAPAN JOGJA PASS

Pemda DIY Siap Bantu Kampus

YOGYA (KR) - Keberadaan aplikasi Jogja Pass yang saat ini mulai diterapkan di DIY, tidak hanya berfungsi untuk mendata wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata. Tapi juga bisa dimanfaatkan oleh pengelola Perguruan Tinggi (PT) di DIY untuk melakukan pendataan terhadap mahasiswa. Oleh karena itu bagi pengelola kampus yang akan melakukan perkuliahan tatap muka disarankan untuk menggunakan Jogja Pass. Dengan begitu, saat ditemukan ada kasus positif, tracing akan lebih mudah untuk dilakukan.

"Saat ini penambahan kasus positif masih ditemukan di DIY. Untuk itu alangkah baiknya bagi PT yang ingin melakukan perkuliahan tatap muka supaya mendownload aplikasi Jogja Pass dan mengisi informasi dengan benar. Kalau informasi diisi secara jujur datanya langsung terintegrasi dengan database pemerintah. Dengan begitu bila terjadi sesuatu memudahkan un-

tuk melakukan tracing," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Roni Primanto Hari MT di Kompleks Kepatihan, Selasa (15/9).

Roni mengungkapkan, keberadaan Jogja Pass yang sangat penting saat pembelajaran tatap muka. Seandainya ada pengelola PT yang mengalami kesulitan dan membutuhkan pendampingan, Diskominfo DIY siap membantu. Misalnya untuk mengaplikasikan Jogja Pass sebagai sarana absensi mahasiswa maupun dosen.

Menurut Roni, selain dimanfaatkan untuk pendataan urusan pariwisata dan pendidikan, Jogja Pass juga bisa digunakan untuk absensi di tempat kerja maupun pabrik yang menampung banyak karyawan. Bahkan saat ini Diskominfo DIY sudah membimbing 67 pabrik untuk melakukan tracing seandainya terjadi sesuatu. Adapun bentuknya berupa absensi keluar masuk arena pabrik.

(Ria)-f

Drone

Menurutnya, drone pemindai suhu tubuh cocok digunakan di tempat strategis dan layanan publik, juga di kerumunan orang seperti pasar, aksi demo, lomba dan berbagai kegiatan masyarakat. Hingga kini Jatayu Drone Thermal sudah dibuat lima unit.

"Masih dalam penyempurnaan untuk ketepatan pengukuran suhunya. Kami

Sambungan hal 1

akan membuat lagi hingga 10 unit," jelas Agus Ujijanto.

Temuan alat tersebut diapresiasi oleh Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. "Ini sangat membanggakan. Di tengah tekanan kerja, tim dari RSI dan Polres Banjarnegara mampu berinovasi untuk kepentingan masyarakat," katanya.

(Mad)-f

Jaksa

Terutama, yang menyangkut permufakatan untuk melakukan tindakan pidana korupsi, dalam Pasal 15 UU Tipikor dan sejumlah pasal dalam pencucian uang (TPPU). "Nanti, biar penuntutan yang menjelaskan pasalnya apa saja. Yang pasti, Pasal 15 itu tetap dan TPPU," ucap Febrie.

Sementara penerapan Pasal 6 UU Tipikor, terkait dengan penyuaian terhadap hakim yang semula direncanakan bakal diterapkan, kata Febrie, tak jadi digunakan untuk menjerat Pinangki. Namun Febrie mengatakan, penggunaan pasal penyuaian terhadap hakim, masih terbuka untuk menjerat tersangka Andi Irfan.

Ditemui terpisah, Kasubdit Penuntutan JAM Pidsus Bimo Suprayoga menerangkan, timnya memang sudah menerima berkas penyidikan tersangka Pinangki. Bimo tak mau berspekulasi kapan rencana timnya bakal mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan. "Nanti kalau sudah siap, pasti kita umumkan," terangnya.

Jika mengacu saat penetapan tersangka, penyidik menjerat Pinangki dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 a

atau b, dan Pasal 15, serta tambahan TPPU.

Dalam penyidikan di JAM Pidsus, tersangka jaksa Pinangki dituduh menerima uang 500 ribu dolar AS atau setara Rp 7,5 miliar dari terpidana Djoko Tjandra.

Uang tersebut, diberikan lewat perantara tersangka Andi Irfan. Diduga, uang tersebut sebagai panjar pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra, adalah

(Ful)-d



Prakiraan Cuaca Rabu, 16 September 2020

Lokasi	Pagi	Cuaca			Suhu °C	Kelembaban
		Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					23-32	55-90
Sleman					22-31	65-95
Wates					23-32	55-90
Wonosari					23-32	55-90
Yogyakarta					23-32	60-90

Ket. Cerah Berawan Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Peltr

Grafis : Arko